

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berbagai jenis sumber daya alam dapat dioptimalkan di setiap wilayah di Indonesia seperti hutan, tambang, pertanian dan perikanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak dengan jumlah 237,64 juta jiwa pada tahun 2010 dan merupakan populasi tertinggi keempat di dunia.¹ Dengan manajemen yang baik tentunya kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa.

Kesejahteraan rakyat akan tercapai apabila setiap warga negara memiliki pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan tugas dan kewajiban hampir di setiap negara di dunia termasuk Indonesia untuk menjamin hak warganya dalam memperoleh pekerjaan. Pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.² Hal ini berarti, setiap warga negara berhak memiliki pekerjaan yang layak dan pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab akan hal tersebut. Dengan

¹ Riski Adam, “Penduduk Indonesia Terbesar Keempat di Dunia”. *Liputan6.com*. 24 November 2011

² Anonim, *UUD 1945 dan Perubahannya* (Jakarta: Gradien Mediatama, 2011), p.37

demikian untuk terwujudnya kesejahteraan tersebut maka negara harus berupaya menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain masalah pengangguran harus menjadi prioritas bagi negara untuk diselesaikan.

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa. Sampai saat ini masalah pengangguran terus melanda berbagai negara termasuk Indonesia. Berdasarkan fakta yang ada tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Berikut data tingkat pengangguran di beberapa negara di Asia Tenggara.

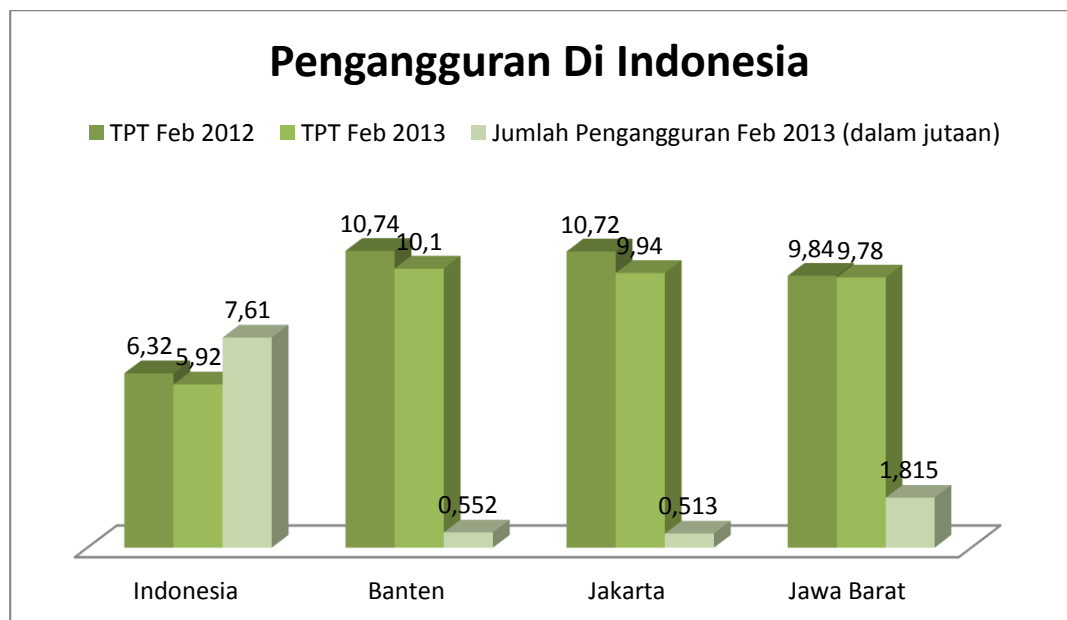
Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Di Asean
Tahun 2006 – 2009

Negara	2006	2007	2008	2009
Thailand	1,2	1,2	1,2	1,2
Malaysia	3,3	3,2	3,2	3,6
Singapura	4,5	3,9	4,0	5,9
Filipina	8,0	7,4	7,3	7,5
Indonesia	10,3	9,1	8,4	7,9

Sumber : World Bank, Diolah, 2013

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia masih harus memprioritaskan penanganan yang maksimal untuk masalah pengangguran dari berbagai aspek di wilayah Indonesia.

Pengangguran di Indonesia merupakan akumulasi dari tingkat pengangguran yang ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia baik kota maupun daerah. Daerah perkotaan terkhusus kota-kota besar yang berada di pulau Jawa merupakan kontributor paling tinggi dengan tingkat penganggurannya apabila dibanding dengan tingkat pengangguran secara nasional.



Gambar I.1: Pengangguran Indonesia Feb 2012- Feb 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas terjadi penurunan tingkat pengangguran dari tahun 2012 ke tahun 2013. Namun angka tersebut masih relatif tinggi apabila angka tingkat pengangguran di kota yang berada di pulau Jawa dibandingkan dengan angka tingkat pengangguran secara nasional. Pada tahun 2013, Banten dengan tingkat pengangguran 10,1 persen memiliki tingkat pengangguran tertinggi, dan Jawa Barat dengan 9,78 persen di

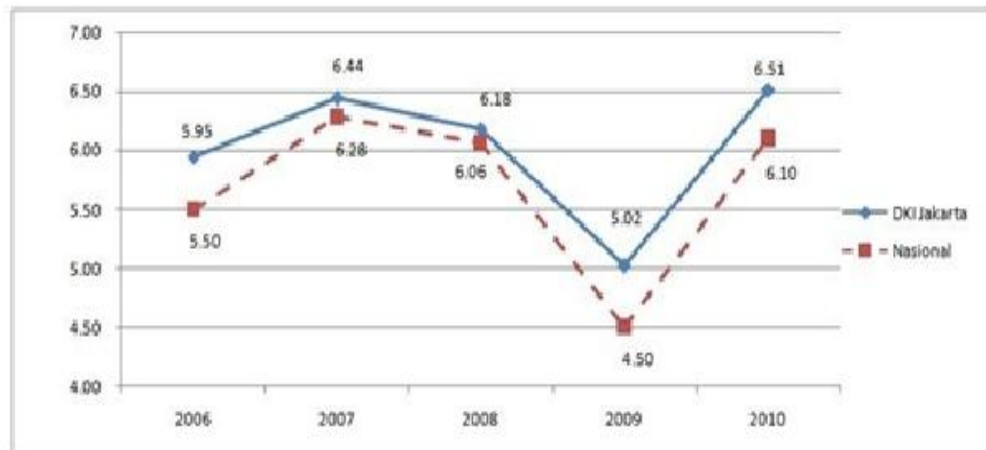
urutan ketiga. Sedangkan Jakarta berada pada posisi kedua dengan 9,94 persen.

Sebagai ibukota negara Indonesia, DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian yang seharusnya dapat meminimalisir tingkat pengangguran supaya daerah atau provinsi lain dapat menjadikan Jakarta sebagai contoh dalam pengentasan masalah pengangguran. Namun pada kenyataannya walaupun mengalami penurunan hanya 0,78 persen, DKI Jakarta memiliki tingkat pengangguran tertinggi setelah provinsi Banten. Secara teoretis angka pengangguran yang masih dapat ditolerir adalah sekitar 4 – 5 % per tahun³. Angka pengangguran yang lebih dari 5% akan membawa dampak politis yang besar berupa hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan krisis sosial. Hal ini senada dengan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, Menurut Menteri Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2008, Suparno bahwa terdapat batasan tingkat pengangguran natural atau batas wajar di wilayah Indonesia, yaitu 4 persen hingga 6 persen⁴. Sehingga jika nilainya lebih dari 6 persen maka diidentifikasi terdapat permasalahan ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jakarta harus mampu menganalisa penyebab serta solusi dalam mengatasinya di tengah kondisi perekonomian yang sedang membaik.

³ Rahardja dan Manurung. Teori Ekonomi Makro (Jakarta: LPFEUI, 2008), p. 7

⁴ (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1700&Itemid=195). Diakses pada 25 Juli 2013 pukul 22.53.

Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah menjadi indikator keadaan perekonomian di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi seperti berikut :



Gambar I.2: Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, 2006-2010

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Berdasarkan grafik sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 DKI Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2009 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. hal ini tentunya berdampak terhadap stabilitas perekonomian. Setelah tahun 2010 sampai saat ini pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan.

Direktur Jenderal Penempatan Tenaga Kerja, Kemenakertrans, Reyna Usman mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir ini semakin membaik. Namun ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi

ini belum bisa mengatasi seluruh masalah pengangguran yang terjadi.⁵ Hal ini dikarenakan tingkat penambahan angkatan kerja tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerja sehingga pengangguran di ibukota terus bertambah. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah pengangguran di Jakarta meningkat 23.800 orang yakni 542.710 pada Februari 2011 menjadi 566.510 pada Februari 2012.⁶

Selain itu, jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Jakarta. Berikut data jumlah penduduk di Jakarta berdasarkan BPS DKI Jakarta.



Gambar I.3: Jumlah Penduduk Jakarta Tahun 2006-2011

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Diolah, 2013

⁵ Ella Syafputri, "Pertumbuhan ekonomi belum dapat mengurangi pengangguran". Antara News. 27 April 2013

⁶ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta No. 23/05/31/Th XIV, 7 Mei 2012*. p.73

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk di Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan jumlah angkatan kerja menjadi ikut meningkat dan hal ini berdampak dalam peningkatan pengangguran sehingga angka pengangguran di Jakarta menjadi tinggi.

Tingginya jumlah pengangguran di Jakarta merupakan masalah besar yang harus dibenahi secara bersama-sama. Deded Sukandar, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta mengatakan peningkatan jumlah pengangguran ini bukan hanya masalah Pemprov DKI Jakarta saja, melainkan juga menjadi masalah provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan sudah menjadi masalah nasional yang juga turut dipikirkan oleh pemerintah pusat. Sebab, menurut Deded, tingginya jumlah pengangguran di DKI Jakarta disebabkan oleh tak terbendungnya laju urbanisasi dari berbagai daerah yang menuju ke Jakarta.⁷ Mengenai pengangguran, Muhayat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan pengangguran terjadi karena urbanisasi tidak bisa ditekan. Itu terlihat dari setiap tahunnya setelah lebaran, Jakarta akan menampung kaum pendatang dari provinsi lain sebanyak 205 ribu hingga 300 ribu orang.⁸

Tingginya jumlah dan kepadatan penduduk di Jakarta tidak mampu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja situasi menyebabkan banyak penduduk yang telah masuk usia kerja tidak memiliki pekerjaan. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan jumlah lapangan pekerjaan di Jakarta

⁷ Lenny Lenny, "Pengangguran di Jakarta Capai 543 Ribu Orang". Beritajakarta.com. 24 Agustus 2008

⁸ *Ibid*

tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas. Tahun ini jumlah penganggur lulusan SMA/SMK 1.905 orang dan perguruan tinggi/diploma 1.126 orang.⁹

Ketersediaan lapangan kerja dipengaruhi oleh investasi yang ada di Jakarta. Investasi yang masuk Jakarta saat ini bersifat padat modal yang artinya lebih sedikit membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja di Jakarta saat ini tidak setinggi pada periode sebelumnya, penjelasan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro.¹⁰

Pengangguran juga terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia lokal. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal disebabkan rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Investor lebih banyak memilih menggunakan tenaga kerja asing untuk kegiatan operasionalnya.¹¹ Hal ini membuat para pencari kerja lokal sangat sulit untuk bersaing karena tidak berkompeten apabila dibanding tenaga kerja pendatang menjadi pengangguran.

Upah merupakan sumber penghasilan bagi tenaga kerja. Dengan menaikkan upah diharapkan peningkatan kualitas hidup tenaga kerja akan semakin meningkat. Namun pada kenyataannya, kenaikan upah minimum yang baru-baru ini terjadi di Jakarta justru menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini sesuai dengan pendapat Ketua Dewan Pimpinan

⁹ Guruh. "Jumlah Pengangguran di Jakarta Bertambah". Pos Kota. 10 Desember 2012

¹⁰ Harwanto Bimo Pratomo, "Tingginya investasi tidak bantu serap pengangguran". Merdeka.com. 8 Februari 2013

¹¹ *Ibid*

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi yang mengatakan kenaikan upah minimum secara menyeluruh di Jakarta dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran.¹² Hal ini dikarenakan tidak semua perusahaan di Jakarta termasuk dalam kategori usaha besar.

Menurut Sofjan 90 persen pengusaha bergerak di level Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah harus melihat bahwa kenaikan upah minimum akan menjadi beban bagi UKM sehingga akan terjadi pemangkasan biaya yang dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).¹³ Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan eksistensi UKM tersebut. Tentu saja hal ini yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di Jakarta di kemudian hari.

Setelah melihat beberapa fakta di atas maka dapat diketahui bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengangguran di Jakarta baik dari dalam Jakarta maupun dari luar Jakarta. Permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun telah menjadi tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Jakarta.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Jakarta. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena permasalahan

¹² Willy Widiyanto. "Apindo: Upah Buruh Naik, Jumlah Pengangguran Semakin Banyak". *Tribunnews.com*. 18 November 2012

¹³ *Ibid*

pengangguran berpengaruh langsung dalam kelangsungan hidup masyarakat serta pembangunan perekonomian bangsa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh urbanisasi terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh lapangan pekerjaan terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
6. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
7. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?
8. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di DKI Jakarta?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pada kenyataannya masalah pengangguran memiliki penyebab yang luas dan kompleks. Namun karena terbatasnya dana, waktu, teori dan data maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi sebagai bahan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan pengangguran

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai informasi mengenai perekonomian dan pengangguran bagi masyarakat
- b. Sebagai bahan analisis dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan pengangguran yang terjadi pada masyarakat
- c. Fakultas Ekonomi UNJ untuk memperkaya khasanah penelitian ilmu ekonomi makro